



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA**
Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

Tribunnews.com (Media Online)

Selasa, 28 Mei 2024

Warga Keluhkan Proyek Jalan Pintu Masuk RSUD Kotamobagu Sulawesi Utara



Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Proyek pembangunan jalan pintu masuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, dikeluhkan warga.

Proyek pembangunan jalan dengan panjang sekitar ratusan meter itu kabarnya menggunakan anggaran daerah sebesar Rp 900 juta. Proyek tersebut menuai protes dari warga sekitar, khususnya di lingkungan RSUD, di Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan.

Salah seorang warga, Rovinus Talulembang mengatakan bila proyek ini jelas berdampak bagi mereka. Rovinus menegaskan bila proyek pembangunan tersebut sudah merampas hak dari masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan jalan masuk itu dipagari dengan dinding beton dengan tinggi sekitar dua meter.

“Ini jalan milik masyarakat. Semua berhak atas jalan ini, kalau seperti ini, kalau dipagari (dinding tembok), indikasi pemerintah telah merampas hak rakyatnya,” katanya.

Menurutnya, dinding pagar yang dibangun di samping badan jalan, begitu berpengaruh pada aktivitas masyarakat.

“Ini mesti dibongkar. Karena ini merampas hak dari masyarakat,” ucap Rovinus kepada Tribunmanado.co.id, Rabu (29/5/2024).

Rovinus meminta agar pemerintah bisa mengevaluasi pembangunan proyek tersebut. “Kalau memang begini masyarakat yang dirugikan. Pemerintah harus evaluasi kembali, kalau bisa bijaklah.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA

Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

Saya juga minta tolong bagi yang berwenang mengawasi anggaran ini, bukti-bukti kan sudah diserahkan, jadi oknum-oknum itu harus bertanggung jawab dengan Rp 900 juta, kalau memang salah menempatkan anggaran, anggaran itu harus dikembalikan. Itu APBD,” tuturnya.

Lebih lanjut, Rovinus mengungkapkan saat ini proses gugatan terhadap pembangunan proyek itu sudah berjalan.

“Sudah pengaduan, gugatan, juga sudah sempat audiens dengan Pj Wali Kota. Untuk gugatan sudah Kasasi. Kita tinggal menunggu,” ucapnya.

Dirinya kemudian meminta agar pemerintah bisa menseriusi hal ini.

“Kita minta ariflah pemerintah, ini sudah mau jalan dua tahun, yang dirugikan ini masyarakat. Dan 900 juta itu harus dipertanggungjawabkan oleh oknum-oknum pelaksana,” katanya.

Dari pantauan di lokasi, jalan tersebut memang masih belum beroperasi.

Bahkan, terlihat ada beberapa sampah plastik bekas makanan dan minuman di beberapa titik lokasi jalan tersebut.

Di sisi lain, Pemerintah Kotamobagu melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kotamobagu, Claudy Mokodongan, beri tanggapan.

Menurutnya konflik yang terjadi tidak ada sangkut pautnya dengan Dinas PUPR, melainkan pihak RSUD Kotamobagu.

“Kalau untuk pembangunan jalan memang PUPR tapi kalau info terkendala itu kan lantaran konflik pagar itu. Kalau jalan tidak ada permasalahan, kalau untuk dioperasikan itu sudah kewenangan rumah sakit,” tutur Claudy.

Sementara, Direktur Utama RSUD Kotamobagu, Fernando Mongkau, membenarkan bila saat ini proyek tersebut masih belum beroperasi.

Hal ini dikarenakan masih dalam proses hukum yang ditangani pemerintah kota.

“Itu dari pemerintah Kotamobagu bagian hukum, kita masih menunggu dari Pemkot. Memang, yang jelas kita masih pakai jalan (pintu) keluar itu. Menunggu proses dari bagian hukum Pemkot.

Kalau (proyek) itu belum selesai, masih ada pembangunan lanjutan. Tapi kita masih menunggu, karena yang mengurus itu pemkot bagian hukum,” katanya menutup pembicaraan.